



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2027
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS**

[BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA]

Jl. Dr. Soeparno No 32 Purwokerto Telp./Fax : 0281 636079 website : bkpsdm.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia- Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2027, Renja ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama satu tahun dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ~~tentang~~ Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa ruang lingkup utama perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD ;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja ini memuat beberapa hal terkait dengan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2027 diantaranya adalah:

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kinerja;
- d. Kelompok sasaran;
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Purwokerto, 31 Maret 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



IR EKO PRIJANTO, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196703181991031011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana untuk melaksanakan urusan yang dimanatkan dalam undang-undang tersebut ke daerah maka melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2027, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Tahun 2027 juga berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2027 dilakukan melalui tahapan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, Identifikasi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat dan Finalisasi dokumen renja untuk diintegrasikan ke RKPD.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2027 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2025. Adapun program dalam Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah mengacu pada program sesuai dengan penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35). Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah mewujudkan tujuan, sasaran, melalui strategi, kebijakan, dengan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas yang memedomani pada Renstra SKPD 2025-2029

Renja BKPSDM Tahun 2027 menjadi bagian dari RKPD Tahun 2027 yang mengusung tema pembangunan daerah berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan demikian program dan kegiatan BKPSDM diarahkan untuk pencapaian visi pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas ASN sebagai motor penggerak birokrasi. Selanjutnya Renja BKPSDM akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM yang terintegrasi ke dalam RAPBD 2027 sehingga setiap program pengembangan SDM Aparatur dapat terdani secara optimal dan tepat sasaran. Dengan latar belakang tersebut, Renja BKPSDM Tahun 2027 diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan ASN, memperkuat kapasitas birokrasi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk menyiapkan rencana kerja tahunan, Tahun Anggaran 2027 yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.
- b. Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun anggaran 2027 dan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas mencoba mengevaluasi dengan mengkaji dan menelaah hasil capaian kinerja antara realisasi pelaksanaan, rencana kerja dengan capaian Renstra SKPD yang sudah ditetapkan, serta prakiraan capaian pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun 2026 dengan tabel sebagai berikut :

Keterangan :
1 : Tujuan , 2 Sasaran,
3:Program, 4: Kegiatan, 5: Sub
Kegiatan

Evaluasi RKPD Tahun 2025
Triwulan IV

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
SUB OPD : BADAN
KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025		Tingkat Capaian kinerja dan Realisas i Anggara n 2025 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Permas alahan	Keterangan		
			Tahun 2024- 2026							1	2		3	4													
3	4	4A	5		6		7			8	9	10	11	12= 8+9 +10 +11		13=12 /7*10 0		14=6+12		15=14/5 *100		16	17				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA PERUBAHA N																		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			K	Rp	K
[1] Meningkatnya ASN yang kompeten dan kompetitif																											
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	73		80.1		80.1		80.1		70.05		79.69		79.92	80.14		80.14		100.05		80.14		109.78			Nilai sementara pada TW 4 (masih dalam proses kegiatan)= IP ASN 80.14

																									Penilaian Indeks Profesionalitas ASN pada akhir tahun TW 4: IP ASN 80.14
	Nilai Sistem Merit	Angka	300		262		300		300					290.5		96.83		290.5		96.83					Nilai sistem Merit sampe TW 4 adalah 290.5
[2] Meningkatnya kompetensi ASN																									
	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	%	100		165.25		100		100		46		74.25		95.5		125.5		125.5		125.5				Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dan Lulus dalam pengembangan kompetensi ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi / jumlah target yang mengikuti diklat x 100% 502/400X100%= 125,5%
[3] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							1.983.214.625		1.983.214.625		60.832.400		279.649.500		535.80		591.335.		1.467.619.431		29.				

															2 . 4 1 3	1 1 8				8 2						
	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	0. 8		4.72		0.8		2.8		1.32		2. 18		2 . 7 5	3 . 6 2		3.62		129. 29		3.62		45 2. 5		pada TW I+II+III = 502/14.595x 100%=3,43 %
[4] Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.983. 214.6 25			1.9 83. 214 .62 5		60.83 2.400		279.64 9.500	5 3 5 . 8 0 2 . 4 1 3	5 9 1. 3 3 5. 1 1 8			1.4 67. 61 9.4 31		2 9 . 8 2					
	Prosentase penyelenggara n kompetensi manajerial dan fungsional	%	95		100		95		100		100		10 0		1 0 0	1 0 0		100		100		100		10 5. 26		Pada TW 4 Penyelengga raan peserta yang Lulus diklat pengemban gan kompetensi n/JML peserta diklat x100% = 100% 72/72x100% = 100%
[5] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							1.983. 214.6 25			1.9 83. 214 .62 5		60.83 2.400		279.64 9.500	5 3 5 . 8 0 2 . 4 1 3	5 9 1. 3 3 5. 1 1 8			1.4 67. 61 9.4 31		2 9 . 8 2					

	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4		7		4		4		2		3		5		6		6		150		6		150				Pelaksanaan Diklat Latsar angk 1 dan 2 Pelaksanaan Orientasi PPPK
[4] Pengembangan Kompetensi Teknis																													
[5] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																													
[2] Meningkatnya Kinerja ASN																													
	Prosentase kinerja ASN Kategori BAIK	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		Total ASN yang sudah kirim e-kinerja 13.650 orang 70% ASN dalam OPD mendapat nilai Baik 100% 70% dari 14.595 ASN = 10.216 (mendapat nilai Baik) x100%= 100 %
[3] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2.493.443.250		2.493.443			200.384.685		334.287.450		308		1.34		2.189.22		53						

										.25 0					. 2 3 2 . 9 0 8	6. 3 2 2. 3 9 3		7.4 36		. 9 9					
	Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian	%	10 0		100		100		100		100		10 0		1 0 0		100		100		100		10 0		Jml pegawai yang dikelola/jml total ASN x 100% 14.595/14.595x100%=100%
[4] Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							293.4 15.00 0		293 .41 5.0 00		33.89 9.000		16.801. 791		2 1 . 1 4 5 . 0 0 0	1 9 2. 5 8 3. 1 3 4		26 4.4 28. 92 5		6 5 . 6 3					
	Prosentase pegawai yang sesuai kompetensi	%	10 0		99		100		100		99.67		99 .8 3		9 9 . 8 3		99.83		99.8 3		99.83		99 .8 3		pegawai yang sesuai kompetensi/ jml eselon III dan IV pegawai yang tidak sesuai kompetensi ada 1 pegawai es III/IV yang sudah kompetensi ada 609 609-1 = 608 608/609x100%=99,83%

[5] Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK								125.365.000		125.365.000		300.000		3.750.000		13.465.000		93.574.791		111.089.791		74.64						
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2		3		2		2		2		2		2		2		2		100		2		100			Pelantikan PPPK sejumlah 1.358
[5] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								38.050.000		38.050.000		27.650.000					8.820.000		36.470.000				23.18					
	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	2400		634		800		800		141		232		189		169		731		91.38		731		56.88			Jumlah ASN yang Pensiun pada TW IV ada 169 orang
[5] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								20.000.000		20.000.000		5.949.000		12.018.796		300.000		90.000		18.357.796				0.45				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100			Jumlah Dokumen Simpeg (1 aplikasi)

[5] Pengelolaan Data Kepegawaian							10.000.000		10.000.000							8.669.920		8.669.920		86.7					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	11000		13985		11000		13985		13853		13609		13985	13985	100		13985		127.14				Total ASN (PNS dan PPPK) sejumlah 13.985 pegawai
[5] Fasilitas Lembaga Profesi ASN							100.000.000		100.000.000				1.032.995		7.380.000	81.428.423		89.841.418		81.43					
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1		1		1		1		1		1		1	1	100		1		100				Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi adalah KORPRI
[4] Mutasi dan Promosi ASN							701.178.000		701.178.000		40.130.000		112.160.000		36.977.000	437.002.598		62.626.598		62.32					
	Jumlah ASN yang Mutasi dan Promosi	Dokumen	500		71		350		350		13		318		384	573	573	163.71		573		114.6			Jumlah ASN yang Mutasi dan Promosi Promosi pada TW 4 sejumlah 6 orang

																								Mutasi Internal 62 orang Mutasi eksternal - orang Mutasi Masuk 1 orang Jumlah TW 2+Tw3 = 318+66+189 = 573 melebihi target karena mutasi internal guru dan kepala sekolah
	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi sesuai dengan kompetensi	Angka	350			350		350							195		55.71		195		55.71			Jumlah Mutasi dan Promosi ASN pada TW 4 ada 195 orang Mutasi = 189 orang Promosi jpt = 6 orang
[5] Pengelolaan Mutasi ASN							5.645.000		5.645.000		1.210.000			750.000	3.464.099		5.424.099		61.37					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	Dokumen	1500		6	500		350		13		252		67	189	521		148.86		521		35.13		Mutasi internal sampai TW 4 sejumlah 189 orang

	Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah																										
[5] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							28.51 2.000		28. 512 .00 0		9.845. 000			1 . 4 4 6 . 0 0 0 0	3. 7 4 0. 0 0 0		15. 03 1.0 00		1 3 . 1 2								
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	54 00		2431		1800		1800		141		56 2		5 6 0	7 5 9		2022		112. 33		2022		82 .4 6			Jumlah KP pada TW 4 sejumlah 759 setiap tahun ada 6 x periode kenaikan pangkat
[5] Pengelolaan Promosi ASN							667.0 21.00 0		667 .02 1.0 00		29.07 5.000		112.16 0.000		3 4 . 7 8 1 . 0 0 0 0	4 2 9. 7 9 8. 4 9 9		60 5.8 14. 49 9		6 4 . 4 4							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12		1		4		4		0		1		2	1		4		100		4		41 .6 7			Pelantikan JPT eselon 2 sejumlah 6 orang
[4] Pengembangan Kompetensi ASN							1.395. 590.5 00		1.3 95. 590 .50 0		114.9 75.00 0		195.33 5.359		2 3 2 . 3 4 1 . 8 3 1	6 7 1. 5 0 5. 0 0 0		1.2 14. 15 7.1 90		4 8 . 1 1							

	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	400		661		400		400		184		297		382		502		125.5		502		125.5			Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya pada TW4 sejumlah 120 orang	
	Persentase ASN yang lulus diklat teknis	Angka	400				400		400							382		95.5		382		95.5				Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensinya pada TW4 TW I+II+III = 382/400X100% 95.5	
[5] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN							1.366.130.500			1.366.130.500		109.875.000		189.335.359		230.741.831		660.650.000		1.190.602.190		48.35					
	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1200		661		400		400		184		113		16		120		433		108.25		433		91.17		Jml pengembangan kopetensi pada TW 4 120 orang 80 Pengembangan kompetensi lewat daring
[5] Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							29.460.000			29.460.000		5.100.000		6.000.000		1.600.000		10.855.000		23.555.000		36.85					

															00		00										
	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	600		841		200		200		10		0		245		245		500		250		500		223.5		Capaian sangat tinggi karena karena terlewat menyesuaik an target DPA Perubahan
[4] Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							103.259.750			103.259.750		11.380.685		9.990.300		17.769.077		45.231.661		84.371.723		43.8					
	Persentase pegawai dengan penilaian kinerja kategori baik	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		pegawai dengan penilaian kinerja kategori baik total 14.350/14.595x100%=98,32% 70% dari 14.595 pegawai berkinerja kategori baik jadi sudah 100%
[5] Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							30.998.500			30.998.500		5.187.695		1.350.000		6.226.970		14.715.952		27.480.617		47.47					

	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	11000		12180		11000		13853		13853		13853		13853		125.94		13853		125.94			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 13853
[5] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							37.787.500		37.787.500		1.645.000		1.963.000		7.140.855		19.480.595		30.229.452		51.555			
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	80		121		80		80		114		114		153		153		191.25		153		191.25	ASN yang Diberikan Penghargaan sampai pada TW IV Jml TW1+TW2= 114+39 =153 orang Capaian sangat tinggi karena karena terlewat menyesuaikan target DPA Perubahan
[5] Pembinaan Disiplin ASN							26.911.250		26.911.250		4.547.990		4.439.300		2.630.00		8.684.465		20.301.755		32.27			

															00										
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	10		23		10		10		1		2		9		11		11		110				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 11 orang
[5] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							4.182.000			4.182.000			225.000		1065000		2.249.399		3.539.399		53.79				
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	10		28		10		10		1		2		9		11		11		90				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 11 orang
[5] Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai							3.380.500			3.380.500			2.013.000		706.250		101.250		2.820.500		3				
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	40		46		40		40		8		9		39		42		42		95				Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 42 orang

[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								21.79 5.895. 095		21. 795 .89 5.0 95			3.081. 969.6 17		2.794.3 88.076	2 . 9 4 7 . 5 7 9 . 5 3 7	9. 4 2 1. 6 6 7. 5 0 9		18. 24 5.6 04. 73 9		4 3 . 2 3						
	Nilai Indek Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3. 51		3.51		3.51		3.51					3 . 5 1	3 . 5 1		3.51		100		3.51		10 0				Nilai Indek Pelayanan Publik Perangkat Daerah adalah 3.51
	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	3. 3		3.3		3.3		3.3					3 . 3	3 . 3		3.3		100		3.3		10 0				Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah adalah 3.3
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81		81		81		81					8 1	8 1		81		100		81		10 0				Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah 81
	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	10 0		100		100		100		100			10 0	1 0 0		100		100		100		10 0				Jumlah Pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerahx100 % ada 6 kegiatan pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah 1. Perencanaa n,

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	6		8		2		2		2		2		2		8		400		8		13 3. 33		Capaian sangat tinggi karena karena terlewatan target DPA Perubahan
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							102.9 60.00 0		102 .96 0.0 00		14.45 0.000		14.225. 000		2 8 . 4 5 0 . 0 0 0 0		2 2. 9 3 0. 0 0 0		80. 05 5.0 00		2 2 . 2 7				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4		5		4		4		4		4		4		4		100		4		10 0		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan dan PPTK 2.Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu 3.Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 4.Belanja Jasa

																										Pengelolaan BMD	
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							19.25 1.519. 595		19. 251 .51 9.5 95		2.504. 821.1 48		2.492.7 10.549		2 . 3 8 1 . 8 2 4 . 7 6 7		8. 5 3 0. 2 5 9. 2 4 4		15. 90 9.6 15. 70 8		4 4 . 3 1						
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	85		180		85		85		65		78		7 8		7 8		78		91.7 6		78		91 .7 6		Jumlah penerima gaji sejumlah 78 orang 7 orang sudah dikembalikan ke OPD masing2
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							556.0 98.20 0		556 .09 8.2 00		115.1 22.46 8		121.26 4.665		1 1 0 . 6 3 1 . 6 5 9		1 5 7. 0 9 6. 5 3 0		50 4.1 15. 32 2		2 8 . 2 5						
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	9		12		3		3		3		3		3		3		12		400		12		13 3. 33		Capaian sangat tinggi karena karena terlewat menyesuaikan target

																										DPA Perubahan	
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							280.2 59.20 0		280 .25 9.2 00		55.67 9.731		51.476. 631	4 4 . 6 6 7 . 2 5 9	8 4. 1 1 4. 1 4 6		23 5.9 37. 76 7		3 0 . 0 2								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36		12		12		12		3		3	3	3		12		100		12			66 .6 7			Laporan jasa komunikasi dan listrik (Okt,Nop, Desember)
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							275.8 39.00 0		275 .83 9.0 00		59.44 2.737		69.788. 034	6 5 . 9 6 4 . 4 0 0	7 2. 9 8 2. 3 8 4		26 8.1 77. 55 5		2 6 . 4 6								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		12		4		4		3		3	4	4		4		100		4			10 0			Laporan penyediaan jasa pelayanan kantor ada 1 laporan 1 laporan Honor tenaga keamanan dan kebersihan
[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							520.9 30.00 0		520 .93 0.0 00		11.80 6.901		26.310. 500	2 2 7 . 6 6	2 3 4. 8 6 9.		50 0.6 54. 26 8		4 5 .								

															7 . 1 5 8		7 0 9					0 8					
	Jumlah laporan pelaksanaan pemelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	15		13		5		5		4		1		0		1		6		120		6		40		Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							133.900.000			133.900.000		5.676.901		20.731.500		24.842.158		69.266.013		120.516.572		51.72					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	25		25		25		25		5		10		20		30		30		120		30		120		Laporan kendaraan dinas yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya

	Pajak dan Perizinannya																									ada 10 unit kendaraan sampe TW 4 = 30 unit
[5] Pemeliharaan Mebel							7.500.000		7.500.000		1.250.000					5.500.000		6.750.000		73.33						
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	75		26	25		25		5		5		5	9		24		96		24		66.67			Pemeliharaan meja kursi kantor
[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							24.530.000		24.530.000		4.880.000		5.579.000		2.825.000	8.380.000		21.664.000		34.16						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60		14	20		20		5		5		5	5		20		100		20		56.67			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.Pemeliharaan AC unit 2. printer
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							5.000.000		5.000.000							2.305.000		2.305.000		46.1						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	45		N/A	15		15		0		0		5	5		10		66.67		10		22.22			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

	Dipelihara/Direhabilitasi																									Bangunan Lainnya 5 kegiatan	
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								350.000.000		350.000.000					200.000		149.418.696		349.418.696		42.69						
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	5				5		5		0		0		5	1		6		120		6			120		Pemeliharaan/Rehab sarana dan prasarana gedung ada 1 kegiatan
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah								682.844.300		682.844.300		49.069.100		125.392.362		109.345.812		336.836.66		620.644.240		49.333					
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	15		20		5		5		5			5	5		20		400		20			133.33			Capaian sangat tinggi karena karena terlewat menyesuaikan target DPA Perubahan
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								9.998.000		9.998.000					3.8		5.25		9.087.		52						

															3 2 . 9 9 3		4. 8 0 4		79 7		. 5 6					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		6		5		5		0		3		6	7		7		140		7		14 0		Komponen Listrik/pene rangan 1.Lampu TL 2. Batu batre 3.Lampu
[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							21.00 3.000		21. 003 .00 0						9 . 4 1 7 . 4 9 0		3. 8 9 7. 3 5 2		13. 31 4.8 42		1 8 . 5 5					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5		5		5		0		3		5	5		5		100		5		10 0		Jumlah peralatan dan perlengka n kantor 5 paket
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							22.81 6.000		22. 816 .00 0		4.175. 500		4.054.0 00		8 0 0 . 0 0 0		2. 5 5 7. 4 9 9		11. 58 6.9 99		1 1 . 2 1					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		6		5		5		3		5		5	6		6		120		6		12 0		Ada 1 Paket yng disediakan di TW 4 jumlah sampe TW 4 ada 6 paket
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor							289.7 05.00 0		289 .70 5.0 00		20.01 4.500		43.845. 000		3 7 . 7		1 4 9. 7		25 1.3 85.		5 1 .					

															7 4 . 5 0 0		5 1. 0 0 0		00 0		6 9						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36		30		12		12		6		3		3		3		15		125		15		12 5		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor pada TW 4 ada 3 paket
[5] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							23.18 0.000		23. 180 .00 0						7 . 6 3 7 . 0 0 0		1 2. 9 5 5. 0 0 0		20. 59 2.0 00		5 5 . 8 9						
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6		8		2		2		0		1		1		1		3		150		3		18 3. 33		Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ada 1 paket cetakan banner dan stopmap
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							300.4 92.30 0		300 .49 2.3 00		23.87 9.100		77.493. 362		3 5 . 3 0 6 . 0 2 3		1 6 2. 4 2 1. 3 1 1		29 9.0 99. 79 6		5 4 . 0 5						
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18 0		74		60		60		10		20		2 0		2 0		70		116. 67		70		80		Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

																										Konsultasi SKPD 20 paket	
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							15.65 0.000		15. 650 .00 0		1.000. 000			1 4 . 5 7 7 . 8 0 6				15. 57 7.8 06		0							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12		N/A		12		12		0		3		1 2	1 2		12		100		12		10 0			Sudah dilaksana n pada TW 3
[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							681.5 43.00 0		681 .54 3.0 00		386.7 00.00 0		14.485. 000	8 9 . 6 6 0 . 1 4 1		1 3 9. 6 7 5. 0 6 0		63 0.5 20. 20 1		2 0 . 4 9							
	Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	5		5		5		5		4		5		5		5		100		5		10 0			Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ada 1 buah 1.Pengadaa n Laptop	
[5] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							182.7 50.00 0		182 .75 0.0 00					2 3 . 2 2		1 2 9. 9 7		15 3.1 98. 30 0		7 1 .							

															3 . 1 4 0		5. 1 6 0				1 2							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9		5		3		3		0		3		1		1		5		166. 67		5		11 1. 11			Pengadaan Printer Capaian sangat tinggi karena karena terlewat menyesuaikan target DPA Perubahan
[5] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								498.7 93.00 0		498 .79 3.0 00		386.7 00.00 0		14.485. 000		6 6 . 4 3 7 . 0 0 1		9. 6 9 9. 9 0 0		47 7.3 21. 90 1		1 . 9 4						
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	45		3		15		15		15		1		1		1		18		120		18		46 .6 7			Capaian sangat tinggi karena karena terlewat menyesuaikan target DPA Perubahan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA																				
OPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SUB OPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
PERIODE PELAKSANAAN : Tahun 2024 - Tahun 2025																				
No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Pada				Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD				Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	
							2024		2025		2024		2025		2024		2025			
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		22	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	[Tujuan] Meningkatnya ASN yang kompeten dan kompetitif																			
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65.65	73		71		72		80.1		80.14		109.73		109.78		109.78	
		Nilai Sistem Merit	Angka		300		300		300				290.5				96.83		96.83	
2	[Sasaran] Meningkatnya kompetensi ASN																			
		Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	%	100	100		100		100		165.25		125.5		165.25		125.5		125.5	
3	[Program] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							251.762.500		1.983.214.625		183.387.500				72.82		74		
		Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	1.07	0.8		1.1		0.8		4.72		4.72		590		590		590	
4	[Kegiatan] Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							251.762.500		1.983.214.625		183.387.500		1.467.619.431		72.82		74		
		Prosentase penyelenggaraan kompetensi manajerial dan fungsional	%	96.75	95		95		95		100		100		105.26		105.26		105.26	

5	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							251.762.500		1.983.214.625		183.387.500		1.467.619.431		72.82		74		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	8	4		4		4		7		6		175		150		150	
6	[Kegiatan] Pengembangan Kompetensi Teknis																			
7	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
8	[Sasaran] Meningkatnya Kinerja ASN																			
		Prosentase kinerja ASN Kategori BAIK	%	99.66	100		100		100		100		100		100		100		100	
9	[Program] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2.018.223.210		2.493.443.250		1.479.625.142				73.35		87.79		
		Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian	%	98.05	100		100		100		100		100		100		100		100	
10	[Kegiatan] Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							555.595.700		293.415.000		511.872.021		264.428.925		92.15		90.12		

		Prosentase pegawai yang sesuai kompetensi	%	98.05	100		100		100		99		99.83		99		99.83		99.83	
11	[Sub Kegiatan] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							333.456.600		125.365.000		320.370.321		111.089.791		96.07		88.61		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	2		2		2		3		2		150		100		100	
12	[Sub Kegiatan] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							32.000.000		38.050.000		32.000.000		36.470.000		100		95.84		
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	577	2400		800		800		634		731		26.42		56.88		56.88	
13	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							39.717.500		20.000.000		39.717.500		18.357.796		100		91.78		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1		1		1		1		1		100		100		100	
14	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Data Kepegawaian							14.845.000		10.000.000		9.470.000		8.669.920		63.78		86.7		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	11000	11000		11000		11000		13985		13985		127.14		127.14		127.14	
15	[Sub Kegiatan] Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							135.576.600		100.000.000		110.314.200		89.841.418		81.35		89.84		
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1		1		1		1		1		100		100		100	
16	[Kegiatan] Mutasi dan Promosi ASN							694.143.910		701.178.000		471.022.919		626.269.598		67.82		89.31		
		Jumlah ASN yang Mutasi dan Promosi	Dokumen	504	500		500		500		71		573		14.2		114.6		114.6	
		Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi sesuai dengan kompetensi	Angka		350		350		350				195				55.71		55.71	
17	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Mutasi ASN							13.726.400		5.645.000		6.746.400		5.424.099		49.14		96.09		

[illegible]

24	[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							46.069.100		30.998.500		44.612.000		27.480.617		96.82		88.65		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	10963	11000		11000		11000		12180		13853		110.73		125.94		125.94	
25	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							9.777.500		37.787.500		6.475.000		30.229.452		66.22		80		
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	181	80		80		80		121		153		151.25		191.25		191.25	
26	[Sub Kegiatan] Pembinaan Disiplin ASN							35.680.500		26.911.250		33.825.825		20.301.755		94.8		75.44		
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	5	10		10		10		23		11		230		110		110	
27	[Sub Kegiatan] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							3.465.000		4.182.000		3.417.300		3.539.399		98.62		84.64		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	14	10		10		10		28		11		110		90		90	
28	[Sub Kegiatan] Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai							20.087.500		3.380.500		19.167.500		2.820.500		95.42		83.44		
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	29	40		40		40		46		42		165		95		95	
29	[Program] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							14.602.774.638		21.795.895.095		12.840.448.994				87.71		83.71		
		Nilai Indek Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		3.51		3.51		3.51				N/A				N/A		N/A	
		Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai		3.3		3.3		3.3				N/A				N/A		N/A	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		81		81		81				N/A				N/A		N/A	

		Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	93.51	100		100		100		100		100		100		100		100	
		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	15		5		5		6		2		40		13.33		13.33	
30	[Kegiatan] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12.910.258.024		19.354.479.595		11.225.791.455		15.989.670.708		86.9		82.61		
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6		2		2		8		8		133.33		133.33		133.33	
31	[Sub Kegiatan] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							81.960.000		102.960.000		80.360.000		80.055.000		98.05		77.75		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	4		4		4		5		4		125		100		100	
32	[Sub Kegiatan] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							12.828.298.024		19.251.519.595		11.145.431.455		15.909.615.708		86.8		82.63		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	452	85		85		85		180		78		211.76		91.76		91.76	
33	[Kegiatan] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							542.208.300		556.098.200		503.290.036		504.115.322		92.63		90.65		
		Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	9		3		3		12		12		133.33		133.33		133.33	
34	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							226.428.300		280.259.200		204.264.404		235.937.767		90.2		84.2		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36		12		12		12		12		33.33		66.67		66.67	

35	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							315.780.000		275.839.000		299.025.632		268.177.555		94.59		97.2		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4		4		4		12		4		300		100		100	
36	[Kegiatan] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							239.090.000		520.930.000		221.605.159		500.654.268		92.66		96.11		
		Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	5	15		5		5		13		6		86.67		40		40	
37	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							143.200.000		133.900.000		127.285.159		120.516.572		88.86		90		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25		25		25		25		30		100		120		120	
38	[Sub Kegiatan] Pemeliharaan Mebel							7.500.000		7.500.000		7.500.000		6.750.000		100		90		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	75		25		25		26		24		34.67		66.67		66.67	
39	[Sub Kegiatan] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							33.390.000		24.530.000		31.820.000		21.664.000		95.29		88.31		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	60		20		20		14		20		23.33		56.67		56.67	
40	[Sub Kegiatan] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							5.000.000		5.000.000		5.000.000		2.305.000		100		46.1		

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	45		15		15				10				22.22		22.22	
41	[Sub Kegiatan] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									350.000.000				349.418.696				99.83		
		Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		5		5		5				6				120		120	
42	[Kegiatan] Administrasi Umum Perangkat Daerah							819.735.814		682.844.300		799.830.344		620.644.240		97.62		90.89		
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	5	15		5		5		20		20		133.33		133.33		133.33	
43	[Sub Kegiatan] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							10.000.000		9.998.000		9.991.200		9.087.797		99.91		90.9		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	5		5		5		6		7		120		140		140	
44	[Sub Kegiatan] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							27.938.930		21.003.000		27.431.000		13.314.842		98.19		63.39		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5		100		100		100	
45	[Sub Kegiatan] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							20.628.500		22.816.000		18.416.000		11.586.999		89.29		50.78		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	5		5		5		6		6		120		120		120	

46	[Sub Kegiatan] Penyediaan Bahan Logistik Kantor							253.323.000		289.705.000		236.970.900		251.385.000		93.54		86.78		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	36		12		12		30		15		83.33		125		125	
47	[Sub Kegiatan] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							17.986.000		23.180.000		17.975.500		20.592.000		99.94		88.84		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6		2		2		8		3		133.33		183.33		183.33	
48	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							489.859.384		300.492.300		489.045.744		299.099.796		99.81		99.54		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	180		60		60		74		70		41.11		80		80	
49	[Sub Kegiatan] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									15.650.000				15.577.806				99.54		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12		12		12				12				100		100	
50	[Kegiatan] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							91.482.500		681.543.000		89.932.000		630.520.201		98.31		92.52		
		Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	5		5		5		5		5		100		100		100	
51	[Sub Kegiatan] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							73.000.000		182.750.000		71.792.500		153.198.300		98.35		83.83		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	9		3		3		5		5		55.56		111.11		111.11	

52	[Sub Kegiatan] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							18.482.500		498.793.000		18.139.500		477.321.901		98.14		95.7		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	45		15		15		3		18		6.67		46.67		46.67	

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	target Kinerja Capaian Akhir Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sub Kegiatan sd Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2025 (n-2)			Target Program KegiatanSub Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
						Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	FUNGSI PENUNJANG										
	URUSAN KEPEGAWAIAN										
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	%	100		100	100	100	100	100	100
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82.5		81.25	81.16	99.89	81.5	81.5	98.79
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22.75		21.5	21.24	99	21.75	21.75	95.6

		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65		64	63.76	99.63	64.25	64.25	98.8
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase hasil Pengadaan CASN berdasarkan dokumen perencanaan kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase pemanfaatan sistem informasi ASN	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase Pemberhentian ASN yang Terselesaikan	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	800		800	800	100	800	800	100
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1		1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	13985		13985	13985	100	13985	13985	100
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang Terselesaikan	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	350		350	350	100	350	350	100

5.03.02.2.02.000 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1800		1800	1800	100	1800	1800	100
5.03.02.2.02.000 3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4		4	4	100	4	4	100
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kompetensi	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.02.2.03.000 1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	400		400	400	100	400	400	100
5.03.02.2.03.001 4	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	200		200	200	100	200	200	100
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan penilaian kinerja kategori baik	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.02.2.04.000 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	13985		13985	13985	100	13985	13985	100
5.03.02.2.04.000 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200		200	200	100	200	200	100
5.03.02.2.04.000 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	500		100	100	100	200	200	40
5.03.02.2.04.000 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	10		10	10	100	10	10	100
5.03.02.2.04.000 9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	40		40	40	100	40	40	100

5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Angka	92.5		90.5	90.5	100	91	91	98.38
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	84		80	70.64	88.3	81	81	96.43
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	100		100	100	100	100	100	100
		Nilai kematangan organisasi	Angka	45		43	40	93.02	43.5	43.5	96.67
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan / Dokumen	5		5	5	100	5	5	100
5.03.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5		5	5	100	5	5	100
5.03.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4		4	4	100	4	4	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75		75	85	113	75	75	100
5.03.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4		4	4	100	4	4	100

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5	5	100	5	5	100
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5	5	100	5	5	100
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		5	5	100	5	5	100
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2		2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60		60	60	100	60	60	100
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12		12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	5		5	5	100	5	5	100
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		5	5	100	5	5	100

5.03.01.2.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5		5	5	100	5	5	100
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.09.000 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	15		15	15	100	15	15	100
5.03.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5		5	5	100	5	5	100

5.03.01.2.09.000 5	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25		25	25	100	25	25	100
5.03.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5		5	5	100	5	5	100
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	%	100		100	100	100	100	100	100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	%	100		100	100	100	100	100	100
5.04.02.2.02.000 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4		4	4	100	4	4	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok :

BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan ;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BKPSDM terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur ;

- e. Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi ;
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan ;
- g. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Tabel T.C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas

CAPAIAN LPPD KAB. BANYUMAS TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja 2023		Capaian Kinerja 2024		Pengampu	Kendala/Masalah
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN dengan pendidikan Perguruan Tinggi ke atas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1839	57.38	2210	63.76	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	ASN belum mendokumentasikan file dalam SIMPEG
		Total seluruh ASN (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3205		3466			
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai ASN fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	502	15.66	743	21.44	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Belum maksimal jumlah ASN Fungsional/ SDM dan kebijakan/Regulasi 2. Jumlah PPPK yang bertambah
		Total seluruh ASN (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3205		3466			
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	502	100.00	603	81.16	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.Jumlah ASN yang memiliki serfifikat kompetensi masih belum maksimal/ kendala Anggaran 2. ASN belum mendokumentasikan sertifikat dalam SIMPEG
		Jumlah pegawai ASN fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	502		743			

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konteks Kabupaten Banyumas saat ini dan ke depan, Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi (TI). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran aparatur atas pentingnya revolusi mental dan peningkatan pelayanan publik yang profesional melalui pengembangan inovasi teknologi informasi kepegawaian;
2. Peningkatan budaya disiplin, dan taat hukum dikalangan aparatur melalui konsistensi penanganan kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;
3. Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, Assesment dan pengembangan kompetensi;
4. Peningkatan kompetensi dan sumberdaya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T.C 3.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Banyumas

RANCANGAN AWAL RKPD											HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangk a Pendan aan	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendana an	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia			89.866.113.000,00			Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia			89.866.113.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			89.866.113.000,00			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			89.866.113.000,00		
	5	03				KEPEGAWAIAN			83.866.113.000,00			KEPEGAWAIAN			83.866.113.000,00		
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	100 % 80 angka	71.116.113.000,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	100 % 80 angka	71.116.113.000,00		
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesuaian program renja dengan DPA Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100 % 100 %	220.000.000,00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesuaian program renja dengan DPA Persentase kesesuaian program	100 % 100 %	220.000.000,00		

													renja dengan renstra				
	5	03	01	2.0 1	0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokume n	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokume n	110.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.0 1	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 % 2 Dokumen	67.961.113.000,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 % 2 Dokumen	67.961.113.000,00		
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	67.741.113.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	67.741.113.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

																Semua Kel/Desa	
	5	03	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 angka 5 Dokume n 100 %	985.000.000,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 angka 5 Dokume n 100 %	985.000.000,00		
	5	03	01	2.0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

										Arcawinan gun							Timur, Arcawina ngun	
	5	03	01	2.0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	60.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	03	01	2.0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	350.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	350.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	03	01	2.0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

										Arcawinan gun							Timur, Arcawina ngun	
	5	03	01	2.0 6	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	360.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	360.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	03	01	2.0 6	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokume n	40.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokume n	40.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	03	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	10 % 100 %	510.000.000,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD) Persentase	10 % 100 %	510.000.000,00			

							Urusan Pemerintahan Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah				
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						Pengadaan Mebel					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	150.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	150.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	250.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	250.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.07	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor						Pengadaan Sarana dan Prasarana					

					10	atau Bangunan Lainnya					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 3 Dokumen	760.000.000,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 3 Dokumen	760.000.000,00		
	5	03	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100 % 5 Dokume n 70 %	680.000.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100 % 5 Dokume n 70 %	680.000.000,00		

	5	03	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel						
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	50.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	50.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

										Arcawinan gun							Timur, Arcawina ngun	
	5	03	01	2.0 9	0 0 1 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	2 Unit	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	03	01	2.0 9	0 0 1 1	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	15 Unit	80.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokert o Timur, Arcawinan gun	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	80.000.000,00	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Arcawina ngun	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Presentase layanan administrasi	100 % 90 %	12.750.000.000,0 0			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Presentase layanan administrasi	100 % 90 %	12.750.000.000,0 0			

							kepegawaian secara digital						kepegawaian secara digital				
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang sesuai kompetensi	100 %	1.470.000.000,00			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang sesuai kompetensi	100 %	1.470.000.000,00		
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK						Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	800 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	800 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN						Fasilitas Lembaga Profesi ASN					

							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						Pengelolaan Data Kepegawaian					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	11000 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	11000 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan NSPK dan SOP	100 %	1.720.000.000,00			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan NSPK dan SOP	100 %	1.720.000.000,00		
	5	03	02	2.02	00	Pengelolaan Mutasi ASN						Pengelolaan Mutasi ASN					

					01												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1800 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1800 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN						Pengelolaan Promosi ASN					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	1.400.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	1.400.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang melaksanakan kegiatan	80 %	8.610.000.000,00			Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang melaksanakan kegiatan	80 %	8.610.000.000,00		

							pengembangan kompetensi						pengembangan kompetensi					
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	400 Orang	8.500.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	400 Orang	8.500.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori baik	100 %	950.000.000,00			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori baik	100 %	950.000.000,00			
	5	03	02	2.04	002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.04	004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	80 Orang	200.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	80 Orang	200.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN						Pembinaan Disiplin ASN					
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	390.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	390.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.04	008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	10 Laporan	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	10 Laporan	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI

							Pelanggaran Disiplin ASN				, Semua Kel/Desa			Pelanggaran Disiplin ASN				an, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai							
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6.000.000.000,00			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6.000.000.000,00				
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0.8 %	6.000.000.000,00			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0.8 %	6.000.000.000,00				
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan	100 %	6.000.000.000,00			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan	100 %	6.000.000.000,00				
	5	04	02	2.02	007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP TAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H								89.866.113.000,00						89.866.113.000,00		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Perangkat Daerah gabungan yang telah dilaksanakan tidak ada usulan program/kegiatan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas lebih banyak mengarah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi Pemerintah, guna meningkatkan Kualitas ASN yang mengarah pada sasaran :

1. Meningkatnya kompetensi ASN.
2. Meningkatnya Pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi dan kinerja

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan mendukung transformasi digital , BKPSDM Kabupaten Banyumas menghadirkan fitur cuti online melalui aplikasi SIMPATIK. Fitur ini dirancang untuk memudahkan ASN dalam mengajukan cuti tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu. Sebelumnya ASN Kabupaten Banyumas masih mengajukan cuti secara manual dimana pengajuan cuti secara manual ini memiliki beberapa kelemahan antara lain proses yang lambat karena pegawai harus menulis form, menyerahkan ke atasan lalu menunggu disposisi. Hal ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan sistem digital selain itu adanya resiko dokumen hilang atau rusak, adanya potensi kesalahan pencatatan karena data cuti yang dimasukan secara manual rawan salah tulis atau tidak sinkron dengan database kepegawaian serta menyulitkan monitoring karena kesulitan merekap cepat jumlah pegawai yang sedang cuti karena data tersebar di dokumen fisik.

Melalui cuti online pada aplikasi SIMPATIK, pegawai cukup melakukan login menggunakan akun masing – masing , kemudian memilih menu pengajuan cuti, seluruh jenis cuti yang sesuai dengan regulasi kepegawaian tersedia dalam sistem, mulai dari cuti tahunan, cuti sakit hingga cuti alasan penting. Pegawai dapat mengisi formulir elektronik, melampirkan dokumen pendukung bila diperlukan dan langsung mengirimkan permohonan secara daring. Setelah pengajuan dilakukan, sistem akan otomatis meneruskan permohonan ke atasan langsung untuk diverifikasi, kemudian ke pejabat berwenang untuk disetujui. Proses ini transparan, cepat dan dapat dipantau secara real time oleh pegawai melalui aplikasi SIMPATIK.

Selain penambahan fitur cuti online aplikasi SIMPATIK juga menambahkan fitur penilaian 360° hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, Penilaian 360 ° memungkinkan proses evaluasi pegawai dilakukan secara lebih komprehensif, obyektif dan

transparan. Penilaian 360 ° dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi secara langsung dengan pegawai antara lain :

- Atasan langsung yang menilai aspek kepemimpinan, tanggung jawab dan pencapaian target
- Rekan sejawat yang memberikan perspektif tentang kerjasama tim, komunikasi dan integritas

Melalui penilaian 360 ° seluruh proses pengisian penilaian dilakukan secara digital, setiap responden dapat mengakses formulir penilaian sesuai perannya, mengisi indikator yang telah ditetapkan dan mengirimkan hasil secara langsung melalui sistem. Data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga menghasilkan laporan kinerja secara menyeluruh. Keunggulan dari penilaian 360 ° antara lain Objektivitas lebih tinggi karena melibatkan banyak sudut pandang, efisiensi waktu dengan sistem online terintegrasi, transparan hasil yang dapat dipantau oleh pegawai dan pimpinan serta pengembangan kompetensi melalui umpan balik yang lebih beragam. Dengan adanya penilaian 360 ° di SIMPATIK BKPSDM Kabupaten Banyumas berkomitmen membangun budaya kerja yang lebih profesional, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,

Implementasi cuti online dan penilaian 360 ° di SIMPATIK merupakan Langkah nyata digitalisasi birokrasi. Keduanya menghadirkan efisiensi, transparansi dan akurat dalam manajemen ASN sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahap pertama adalah sosialisasi dan pemetaan kebutuhan, di mana BKPSDM melakukan identifikasi kendala pada sistem lama dan menyusun desain aplikasi berbasis kebutuhan riil ASN. Tahap kedua adalah pengembangan dan uji coba sistem di beberapa OPD. Dalam tahap ini, dilakukan pelatihan teknis kepada admin serta simulasi penggunaan aplikasi untuk presensi, input kinerja, dan disiplin. Tahap ketiga adalah implementasi penuh di seluruh OPD, disertai monitoring rutin dan dukungan teknis. SOP juga mencakup tahapan penginputan, validasi, hingga rekapitulasi cuti online dan penilaian 360 °. Bukti keberhasilan inovasi ini antara lain: seluruh OPD telah mengimplementasikan cuti online dan penilaian 360 ° dimana dapat dilihat dari kinerja ASN yang meningkat karena adanya sistem evaluasi yang lebih adil dan menyeluruh, pelayanan publik lebih cepat karena pegawai tidak lagi terhambat oleh proses administrasi manual, Digitalisasi birokrasi terwujud dengan berkurangnya ketergantungan pada dokumen fisik serta pada tahun 2025 BKPSDM mendapatkan penghargaan inovasi terbaik melalui fitur dalam SIMPATIK Terintegrasi dimana salah satunya fitur cuti online dan penilaian 360 °

Untuk menjamin keberlanjutan implementasi inovasi Simpatik Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui BKPSDM telah menyusun beberapa strategi utama yang mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, kinerja organisasi, serta partisipasi dan kolaborasi antar-stakeholder. Pertama, dari sisi regulasi, inovasi ini telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN. Ke depan, regulasi tersebut akan diperkuat dengan petunjuk teknis dan SOP operasional aplikasi, agar implementasi di seluruh OPD berjalan seragam dan terstandarisasi. Kedua, dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin bagi admin Simpatik OPD dan para Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Hal ini bertujuan agar setiap admin memiliki pemahaman teknis

pengoperasian aplikasi serta dalam menilai dan menginput data kinerja secara tepat. Ketiga, dari aspek kinerja organisasi, sistem monitoring dan evaluasi berkala diterapkan untuk menilai efektivitas aplikasi, termasuk melalui survei kepuasan pengguna. Hasil evaluasi menjadi dasar pengembangan fitur baru dan perbaikan sistem. Terakhir, keberlanjutan inovasi ini juga dijaga melalui kolaborasi lintas OPD, seperti BKPSDM, BPKAD, Diskominfo, dan Inspektorat, serta partisipasi aktif ASN sebagai pengguna utama. Sinergi antar-stakeholder ini penting untuk mendukung inovasi secara menyeluruh dan memastikan aplikasi tetap relevan, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045 Pemerintah menerapkan RPJMN 2025-2029 sebagai arah kebijakan Pembangunan nasional. Provinsi Jawa Tengah Menyusun RPJMD 2025-2029 yang selaras dengan RPJMN dengan pentahapan dimana kebijakan diarahkan pada penguatan SDM, transformasi ekonomi, digitalisasi layanan publik serta pengembangan sektor unggulan lokal.

RKP Tahun 2027 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2027 difokuskan pada penguatan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis ekonomi halal, percepatan penanganan isu lingkungan terutama pengelolaan sampah serta peningkatan tata Kelola kepegawaian dan pelayanan publik

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2027 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Ekonomi Daerah ;
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup ;
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah ;
4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas ;
5. Peningkatan Kualitas SDM.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan manajemen ASN, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja. Sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, tahun 2027 menjadi momentum konsolidasi Pembangunan dengan fokus pada SDM unggul, transformasi birokrasi, digitalisasi layanan dan akuntabilitas kinerja.

Arah Kebijakan Nasional tahun 2027 yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM antara lain :

1. Penguatan SDM Unggul
 - Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis digital
 - Penilaian kinerja yang transparan dan objektif (contoh : penilaian 360 °)
2. Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
 - Digitalisasi administrasi kepegawaian (contoh : cuti online melalui SIMPATIK)
 - Reformasi birokrasi menuju pelayanan publik
3. Digitalisasi Layanan
 - Integrasi data ASN dengan sistem nasional
 - Pemanfaatan tanda tangan elektronik dan arsip digital
4. Akuntabilitas Kinerja
 - Penyusunan dan publikasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 - Monitoring capaian kinerja

Dengan fokus ini Pembangunan nasional 2027 diarahkan untuk menciptakan birokrasi modern,digital dan berorientasi hasil sehingga pelayanan publik semakin berkualitas dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengarah pada manajemen Aparatur Sipil Negara dalam mendukung. Mengacu pada visi misi pembangunan Kabupaten Banyumas tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah Meningkatnya Manajemen ASN dan Profesionalitas ASN dengan sasaran :

- Meningkatnya Pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi dan kinerja
- Meningkatnya Kompetensi ASN

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja tahun 2026

A. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program penunjang fungsi Kepegawaian : Program Kepegawaian Daerah
3. Program penunjang fungsi Pendidikan dan Pelatihan : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

B. Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebeulair
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Untuk mengetahui rekapitulasi usulan program dan kegiatan serta besaran perkiraan anggaran yang direncanakan tahun 2026 serta perkiraan maju tahun anggaran 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENIAOPD)
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BANUMAS
TAHUN 2026**

N O	Kode					Urusan/ Bidang/Urusan /Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia						89.866.113.000,00							88.380.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						89.866.113.000,00							88.380.000.000,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						83.866.113.000,00							81.880.000.000,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Presentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang-sangat tinggi	-			100% 80 angka	71.116.113.000,00						-	73.620.000.000,00	
	5	03	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	-			100% 100%	220.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung	ASN Kabupaten Banyumas	-	240.000.000,00	

[illegible]

5	0	0	20		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen 100% 100%	67.961.113,00 0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas	-	70.230.000,00 0,00	
5	0	0	20	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	67.741.113,00 0,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		70.000.000,00 0,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	20	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	220.000.000,00 0	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		230.000.000,00 0	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Kabupaten Banyumas		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	20	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		3	1	6	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	350.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		360.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	20	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		3	1	6	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	40.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	20	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		3	1	6	9															

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	360.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKEMD) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	-			10% 100%	510.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas	-	540.000.000,00	
	5	03	01	207	0005	Pengadaan Mebel														

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	150.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	20	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	250.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	20	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

[illegible]

				Jumlah Mebel yang Dipelihara					25 Unit	50.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	30.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	80.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinan gun	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5	0	0				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Presentase layanan administrasi kepegawaian secara digital	-		100% 90%	12.750.000,00						-	8.260.000.000,00	
	5	0	0	20			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang sesuai kompetensi	-		100%	1470.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas	-	1.700.000.000,00	
	5	0	0	20	000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT ANASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BANYUMAS
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						89.866.113.000,00							88.380.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						89.866.113.000,00							88.380.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						83.866.113.000,00							81.880.000.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						71.116.113.000,00						-	73.620.000.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	-			100 % 100 %	220.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Banyumas	-	240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Banyumas		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			2 Dokumen 100 % 100 %	67.961.113.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas	-	70.230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				85 Orang/bulan	67.741.113.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		70.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 angka 5 Dokumen 100 %	985.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas	-	1.090.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	75.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	60.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN Kabupaten Banyumas		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	350.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		360.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	40.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	360.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	-			10 % 100 %	510.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas	-	540.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	150.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	250.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Dokumen 100 %	760.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas	-	790.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	260.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Deerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	-			5 Dokumen 100 % 70 %	680.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas	-	730.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	50.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				15 Unit	80.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						12.750.000.000,00						-	8.260.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase pegawai yang sesuai kompetensi</i>	-			100 %	1.470.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas	-	1.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				800 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	400.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				11000 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan NSPK dan SOP	-			100 %	1.720.000.000,00			Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas	-	1.840.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1800 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	1.400.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi	-			80 %	8.610.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas	-	3.720.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				400 Orang	8.500.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		3.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori baik	-			100 %	950.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas	-	1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				11000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				80 Orang	200.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	390.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	120.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				40 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	ASN Kabupaten Banyumas		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6.000.000.000,00							6.500.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						6.000.000.000,00						-	6.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan	-			100 %	6.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas	-	6.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	ASN Kabupaten Banyumas		6.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							89.866.113.000,00							88.380.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dikembangkan suatu rencana yang menyeluruh, terjadwal dan transparan serta didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Peran masyarakat atau stakeholder yang lain adalah sangat kami butuhkan sebagai fungsi kontrol yang positif bagi perencanaan kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas untuk Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan yang diharapkan.

Purwokerto, Maret 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



EKO PRIJANTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703181991031011

LAMPIRAN

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL TAHUN 2027

NO	Program/ Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Targe t Wakt u Penye lesaia n	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kepegawaian Daerah													
1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.1.1	Persentase Pemberhentian ASN	Tingginya persentase pemberhentian ASN yang tidak sebanding dengan pengadaan/penempatan ASN baru, Terhambatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Tingginya angka persentase ASN yang pensiun tiap tahunnya, Data kepegawaian belum up to date	Kekurangan pegawai di unit kerja tertentu, Target kinerja tidak tercapai	ASN, OPD, Pemerintah	Perencanaan kebutuhan ASN berbasis proyeksi pensiun, Update data pegawai pada apk SIMPEG	E	Proses pengadaan CASN PNS dan PPPK yang lambat atau tidak sesuai kebutuhan, Tingginya persentase ASN yang Pensiun, Data kepegawaian belum up to date	Perencanaan kebutuhan ASN berbasis proyeksi pensiun, Percepatan rekrutmen CASN/PPPK untuk mengisi formasi yang kosong, Update data pegawai pada apk SIMPEG	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
		1.1.1.1	Persentase hasil Pengadaan CASN berdasarkan dokumen perencanaan kebutuhan yang sesuai formasi	Ketidaksesuaian antara hasil pengadaan CASN dengan dokumen perencanaan kebutuhan formasi jabatan, Terhambatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Ketersediaan formasi jabatan tidak sesuai kualifikasi pendidikan	Ketersediaan SDM ASN tidak optimal, Target kinerja tidak tercapai	ASN, OPD, Pemerintah dan Masyarakat	Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan pegawai berbasis Anjab-ABK terbaru, Bezzeting Pegawai sesuai Peta jabatan	E	Ketersediaan formasi jabatan tidak sesuai kualifikasi pendidikan, Keterbatasan formasi yang disetujui oleh instansi pusat	Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan pegawai berbasis Anjab-ABK terbaru, Bezzeting Pegawai, Menyusun prioritas formasi jabatan strategis sesuai kebutuhan layanan publik	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM

		1.1 .1. 2	Persentase pemanfaatan sistem informasi	Terhambatnya pelayanan administrasi kepegawaian, Serangan hacker terhadap apk SIMPEG	Terkendala update data, ASN belum sepenuhnya bertanggung jawab menjaga dan update terhadap data pribadi	Kebocoran Data pribadi ASN, Terhambatnya Pelayanan SIMPEG yang tidak bisa di akses oleh ASN	ASN, OPD, Pemerintah dan Masyarakat	Update apk SIMPEG dan patch keamanan	KE	Terkendala update data, ASN belum sepenuhnya bertanggungjawab menjaga dan update terhadap data pribadi	koordinasi dengan kominfo untk peningkatan keamanan dengan pemasangan firewall.	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
					Terkendala update data, ASN belum sepenuhnya bertanggung jawab menjaga dan update terhadap data pribadi	Kebocoran Data pribadi ASN, Terhambatnya Pelayanan SIMPEG yang tidak bisa di akses oleh ASN	ASN, OPD, Pemerintah dan Masyarakat	Update apk SIMPEG dan patch keamanan	KE	Terkendala update data, ASN belum sepenuhnya bertanggungjawab menjaga dan update terhadap data pribadi	melakukan audit keamanan secara mandiri pada apk SIMPEG	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
1.2	Mutasi dan Promosi ASN	1.2 .2	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	Ketersediaan ASN antar OPD Kurang merata	Mutasi promosi pegawai belum merata	Penempatan ASN tidak sesuai kompetensi dan jabatannya, Target kinerja tidak tercapai	ASN, OPD, Pemerintah	Bezzeting ASN masing2 OPD sebagai dasar perencanaan mutasi internal antar OPD	E	Kebijakan yang sering berubah	Identifikasi kebutuhan dan Bezzeting ASN masing2 OPD sebagai dasar perencanaan mutasi internal antar OPD	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
				Gratifikasi dan suap dalam proses manajemen kepegawaian	Kurangnya transparansi dalam proses kepegawaian	Penempatan ASN tidak sesuai kompetensi dan jabatannya, Target kinerja tidak tercapai	ASN, OPD, Pemerintah	Sosialisasi gratifikasi dan kode etik ASN	E	ASN kurang memahami aturan terkait gratifikasi	Digitalisasi kepegawaian, Percepatan Manajemen Talenta	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM

1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	1.3 .3	Persentase ASN yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi	Kenaikan Jenjang Jabatan terkendala formasi/kebutuhan jabatan	Peta jabatan belum ditetapkan formasi/kebutuhan jabatan yang tersedia	Target kinerja tidak tercapai, Kompetensi ASN tidak berkembang sesuai kebutuhan jabatan.	ASN, OPD, Pemerintah	Perencanaan kebutuhan jabatan sesuai Anjab ABK	KE	Perencanaan kebutuhan jabatan sesuai Anjab ABK kurang sesuai dengan jumlah ASN yang ada	Koordinasi dengan bagian Organisasi yang memproses penetapan Peta Jabatan, Melaksanakan seleksi bagi PNS yang akan naik jenjang jabatan	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
					Anggaaran diklat terbatas, dialihkan untuk kebutuhan kegiatan yang lain	Target kinerja tidak tercapai, Kompetensi ASN tidak berkembang sesuai kebutuhan jabatan.	ASN, OPD, Pemerintah	Perbanyak metode daring/e-learning yang lebih hemat biaya	KE	Diklat terkedala keterbatasan anggaran, Ketergantungan pada pola diklat tatap muka dengan biaya tinggi.	Pengembangan kompetensi yang tanpa anggaran, Sosialisasi standarisasi jenis pengembangan kompetensi	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
					Kegiatan Diklat pengembangan kompetensi belum menjadi prioritas perencanaan kebutuhan anggaran	Target kinerja tidak tercapai, Kompetensi ASN tidak berkembang sesuai kebutuhan jabatan.	ASN, OPD, Pemerintah	Optimalkan kerja sama dengan LAN, BKN, Kementerian, dan lembaga pelatihan	KE	Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran (misalnya e-learning).	Sosialisasi jenis2 Pengembangan kompetensi yang menggunakan anggaran minimal	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.4 .4	Persentase pegawai dengan penilaian kinerja kategori Baik	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja katagori Baik belum mencerminkan kondisi kinerja ASN yang sebenarnya, Terhambatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Sistem evaluasi masih manual, kurang terintegrasi dengan aplikasi.	Penilaian tidak obyektif (penilaian semua dianggap “Baik” walaupun ada yang berkinerja rendah, ASN yang berprestasi tidak mendapat penghargaan yang layak, sementara ASN dengan kinerja rendah tidak mendapatkan	ASN, OPD, Pemerintah	Optimalisasi penerapan e-Kinerja/aplikasi berbasis digital.	KE	Sistem evaluasi masih manual, kurang terintegrasi dengan aplikasi.	Optimalisasi penerapan e-Kinerja /aplikasi berbasis digital, Penguatan budaya kerja berbasis kinerja (reward & punishment).	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM

						punishment, Target kinerja tidak tercapai								
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia													
2.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional	2.1 .1	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembang an kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	ASN tidak memenuhi standar kompetensi sesuai jabatan, Terhambatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Kegiatan Diklat pengemban gan kompetensi belum menjadi prioritas perencanaa n kebutuhan anggaran	Target kinerja tidak tercapai, ASN tidak memenuhi standar kompetensi sesuai jabatan.	ASN, OPD, Pemerintah	Penguatan kelembagaan pengembangan SDM aparatur melalui regulasi & kelembagaan resmi.	E	Ketergantungan pada pola diklat tatap muka dengan biaya tinggi, Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran (misalnya e- learning).	Sosialisasi standarisasi jenis pengembangan kompetensi, Penggunaan pola e-learning untuk menekan biaya dan memperluas akses.	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM
		2.1 .1. 1	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpina n, dan Prajabatan	ASN tidak memenuhi standar kompetensi sesuai jabatan, Terhambatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Kegiatan Diklat pengemban gan kompetensi belum menjadi prioritas perencanaa n kebutuhan anggaran	Target kinerja tidak tercapai, ASN tidak memenuhi standar kompetensi sesuai jabatan.	ASN, OPD, Pemerintah	Penguatan kelembagaan pengembangan SDM aparatur melalui regulasi & kelembagaan resmi.	E	Ketergantungan pada pola diklat tatap muka dengan biaya tinggi, Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran (misalnya e- learning).	Sosialisasi standarisasi jenis pengembangan kompetensi, Penggunaan pola e-learning untuk menekan biaya dan memperluas akses.	Kepala BKPSDM	Tahun 2027	BKPSDM

